

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. Harapannya agar dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Walaupun, pemerintah daerah telah memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan namun hal tersebut belum dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, ini membuktikan bahwa masih rendahnya kemandirian pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Tabel 1.1 merupakan perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan pada provinsi di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2014-2018.

**Tabel 1.1 Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan
Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan Prov. Jawa Tengah
Tahun 2014-2018 (dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2014	18.764.753.609.619	36.393.953.388.656
2015	20.698.442.504.086	37.743.850.669.644
2016	22.747.773.353.248	53.202.539.860.574
2017	26.945.325.899.152	55.987.747.161.165
2018	26.766.784.398.719	56.236.565.457.704

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2020

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari provinsi Jawa Tengah memiliki PAD yang tidak melebihi dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah seharusnya dalam membiayai urusan rumah tangganya lebih mengandalkan pendapatan asli daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut juga dapat menunjukkan kesiapan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan tanggungjawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu pencapaian hasil di bidang keuangan daerah pada pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio pertumbuhan dan dinyatakan dalam satuan persentase (Antari dan Sedana, 2018). Berikut adalah kinerja keuangan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

**Tabel 1.2 Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah
Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018**

Tahun	Pendapatan	Prosentase
2014	70,820,147,356,093	
2015	80,125,848,250,577	13.1399
2016	88,598,301,995,707	10.5739
2017	98,308,511,343,368	10.9598
2018	99,830,674,145,634	1.5484

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah Prov. Jawa Tengah selama tahun 2015-2018. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintahan daerah tersebut mampu untuk

meningkatkan pertumbuhan pendapatannya secara signifikan setiap tahunnya. Keberhasilan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015); Jauhar (2016) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian Wiguna (2015); Antari dan Sedana (2018) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) memberikan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Machmud dan Radjak (2018) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain PAD dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah (Yanto et al., 2015). Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum (DAU)

merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Wiguna, 2015).

Penelitian Wiguna (2015) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian Jauhar (2016) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015); Machmud dan Radjak (2018) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, maka semakin tinggi DAK maka akan semakin tinggi

Penelitian Machmud dan Radjak (2018) membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian Jauhar (2016) membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah suatu daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya.

Mulyani dan Wibowo (2017) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Hal ini berbeda dengan penelitian Jauhar (2016); Antari dan Sedana (2018); Wiguna (2015) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui adanya ketidak konsistenan dari beberapa penelitian terdahulu, dan penelitian ini mengacu pada penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Perbedaan dari penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) yaitu pada penelitian ini menggunakan tambahan variabel yaitu belanja modal, dalam hal ini didukung pada penelitian Mulyani dan Hardiyanto Wibowo (2017) bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Alasan Peneliti memilih pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan objek penelitian karena Jawa Tengah merupakan provinsi yang luas dan memiliki 35 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota pemerintahan, dan masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Maka dalam penelitian ini ingin meneliti kembali mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2016-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah?

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya

yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut pengaruh Pendapatan Asli Daerah DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah, untuk memberikan sumbangan informasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK dan Belanja Modal yang mempengaruhi kinerja keuangan sehingga Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

